

The logo for PELITA, featuring the word "PELITA" in a bold, sans-serif font. The letters are filled with a gradient from orange to yellow. The logo is set against a white rectangular background, which is centered within a larger red rectangular area.

Junimart Girsang: Pj Gubernur Tak Boleh Rangkap Jabatan

Updates. - [PELITA.WEB.ID](https://www.pelita.web.id)

Sep 22, 2022 - 11:33



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang

PANGKALPINANG - Wakil Ketua Komisi II [DPR RI Junimart Girsang](#) menegaskan penjabat gubernur (Pj) tak boleh rangkap jabatan, sebab akan tidak fokus dalam pembangunan daerah. Menurutnya, Pj Gubernur yang rangkap jabatan menjadi maladministrasi. Pihaknya akan membahas hal ini dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Persoalan ini diketahui setelah Pj Gubernur [Bangka Belitung](#) (Babel) Ridwan Djamaluddin yang juga merupakan Dirjen Mineral Batubara Kementerian [ESDM](#) RI tak hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II [DPR RI](#).

"Kalau ada Penjabat masih menjabat di tempat asalnya itu menjadi maladministrasi. Ini akan kami bawa nanti, dalam rapat dengan Kemendagri, supaya dievaluasi itu. Dia harus memilih Pj atau tetap. Tadi saya tanya, pak

gubernur tidak hadir itu kemana? Ke [Jakarta](#), sudah berapa lama? Sudah seminggu, ngapain? Urusan kedirjenannya. Loh masih dirjen toh sampai sekarang? Saya kaget saja. Ini akan kita minta klarifikasi," tegas Junimart, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II [DPR RI](#) ke [Babel](#), Kamis (22/9/2022).

Untuk meminta penjelasan soal jabatan Ridwan Djamaluddin, Komisi II [DPR RI](#) akan berkirim surat ke Kementerian [ESDM](#) RI. "Kita akan bersurat kepada (Kementerian) [ESDM](#). Apakah betul dirjen ini masih aktif sebagai dirjen, padahal sudah jadi Pj," ungkap Anggota Fraksi [PDI Perjuangan DPR RI](#) ini.

Menurutnya, untuk menanggapi masalah ini Menteri Dalam Negeri harus mengambil sikap bila Pj Gubernur suatu daerah masih ada yang rangkap jabatan.

"Pak Menteri harus mengambil sikap, ya tentu kita akan menegur Mendagri. Kan sebelum menjadi Pj Gubernur masuk proses yang ketat, diputuskan Presiden. Setahu saya, dan saya belum pikun-pikun juga, ada syarat-syarat tidak boleh rangkap jabatan," jelas Junimart.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) [Babel](#), Naziarto yang hadir mewakili Pj Gubernur dalam Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II [DPR RI](#) itu enggan untuk memberikan komentar saat ditanyakan terkait rangkap jabatan Pj Gubernur [Babel](#). (ssb/sf)